

THE EFFECT OF URBAN VILLAGE FUND MANAGEMENT SYSTEMS AND REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS MEDIATED BY ACCOUNTABILITY

PENGARUH SISTEM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DIMEDIASI AKUNTABILITAS

Reza Cahya Anggraini¹, Saiful Anwar²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
19013010003@student.upnjatim.ac.id¹, saiful.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out, test and prove the effect of village fund management and regional financial management information systems on the quality of financial reports with accountability. The research method used is quantitative method and uses primary data by distributing questionnaires. The research sample used the Slovin Formula and had a population of 104 respondents, namely village officials from 3 subdistricts in Surabaya, namely Sambikerep Subdistrict, Tandes Subdistrict and Pakal Subdistrict, so that the sample of this study was 70 respondents. The data analysis technique used in this research uses Partial Least Square (PLS). The results of this study indicate that the Village Fund Management shows no significant results on the Quality of Financial Reports, the Regional Financial Management Information System shows that it has no significant effect on the quality of financial reports, the regional financial management information system shows a significant influence on accountability, and accountability has a significant effect on the quality of financial reports.

Keywords: *Urban Village Fund Management, Regional Financial Management Information System, Quality of Financial Statements and Accountability*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menguji dan membuktikan pengaruh dari pengelolaan dana kelurahan dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner. Sampel penelitian ini menggunakan Rumus Slovin dan memiliki populasi 104 responden yaitu aparatur kelurahan dari 3 Kecamatan di Surabaya yaitu Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Tandes dan Kecamatan Pakal sehingga sampel penelitian ini berjumlah 70 responden. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana kelurahan menunjukkan belum adanya hasil yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas, serta akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kata Kunci : Pengelolaan Dana Kelurahan, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Kelurahan, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, di jelaskan pada pasal 3 ayat 1 bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan juga digunakan sebagai bentuk pelayanan sosial dasar yang memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat diperlukan suatu program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

Pada pengelolaan keuangan daerah tingkat kelurahan, pengelolaan dana kelurahan penting agar dapat mengurangi tudingan unsur politis dari dana kelurahan yang telah dianggarkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alokasi dana kelurahan pada tahun 2019 diiringi dengan aspek perencanaan yang tepat agar tidak menjadi alat politik dan kepentingan pribadi. Alokasi dana kelurahan harus akuntabel dan transparan untuk laporan pertanggungjawaban keuangan kelurahan tersebut. Dana kelurahan digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang diputuskan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Setiap tahun serapan dana kelurahan (dakel) di Surabaya selalu rendah. Seperti fenomena yang telah diberitakan oleh jawapos (Sholahuddin 2022) pada tanggal 5 juli tahun 2022 bahwa hingga akhir Mei 2022

pemakaian anggaran tersebut baru 17,25 persen. Hal itu disebabkan pemkot belum membuat aturan teknis penggunaan dana kelurahan. Dana kelurahan pada tahun 2022 mencapai Rp. 427.239.261.262. Sampai pertengahan tahun yang terserap hanya Rp. 71.573.815.451. Keseluruhan dana kelurahan harus digunakan tidak diperbolehkan sampai tersisa karena dana kelurahan digunakan untuk dua hal yaitu pembangunan sarana-prasarana dan pemberdayaan masyarakat. Dari paparan lurah dan camat, minimnya serapan dana kelurahan disebabkan pemerintah kota belum membuat aturan detail pemakaian dana tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut pemerintah daerah kesusahan dalam mengelola dana kelurahan yang disebabkan belum adanya aturan pemakaian dana kelurahan dari pemerintah kota. Jadi seharusnya pengelolaan dana kelurahan harus dapat diatur dan dikelola dengan baik demi mewujudkan sarana-prasarana yang memadai bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pula.

Menurut (Maydiyanti et al., 2020) kelurahan memiliki hak dan kewajiban terhadap pengelolaan dana kelurahan. Dimana dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan salah satunya adalah akuntabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Idawati & Eleonora, 2020) akuntabilitas keuangan merupakan faktor penting dalam pembentukan kualitas laporan keuangan, Hasil penelitiannya menyatakan akuntabilitas keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian (Sari, M. S., & Zefri, 2019) menyatakan bahwa Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, pengetahuan dan pengalaman PNS dan kelompok masyarakat (Pokmas) terhadap kualitas pengelola dana kelurahan di Kecamatan Langkapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, pengetahuan dan pengalaman PNS dan kelompok masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengelola dana kelurahan.

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD). Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Penelitian yang dilakukan (Ariandi, 2021) yang menyatakan bahwa Terdapat pengaruh positif signifikan Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian (Defitri, 2022) juga menyatakan bahwa Analisis menunjukkan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan Uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang didasari oleh fenomena yang terjadi pada tahun 2022 di kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan tentang Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan dan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Mediasi Akuntabilitas.

Teori Agency

Teori keagenan (*agency teori*) merupakan sebuah teori yang muncul tatkala kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan hal-ikhwal manajemen diserahkan kepada agen. Menurut (raharjo, n.d.) Teori agensi mencoba untuk menjalin hubungan yang formal antara prinsipal dan agen atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan budget. Teori ini menekankan pada rancangan pengukuran prestasi dan imbalan yang berikan agar para manajer berperilaku positif. Teori ini berfokus kepada dua individu yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan responsibilitydesicion making kepada agen. Baik prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai orang--orang ekonomi yang rasional yang semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi, tapi mereka kesulitan membedakan penghargaan atas preferensi, kepercayaan dan informasi. Hak dan kewajiban dari prinsipal dan agen dijelaskan dalam sebuah perjanjian kerja yang saling menguntungkan.

Pengelolaan Dana Kelurahan (X1)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Lebih lanjut pada PeraturanPemerintahtersebut Pasal 68 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kelurahan paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap kelurahan secara proporsional

yang merupakan Alokasi Dana Kelurahan. Dengan demikian, Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak Kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Pemerintah Pusat.

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X2)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Aplikasi ini adalah sebagai alat bantu dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah secara elektronik, informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas harus terdapat empat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

Akuntabilitas (Z)

Akuntabilitas memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas,

dan anggaran publik oleh suatu institusi. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data primer dengan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu 5 aparatur kelurahan yang ada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Tandes dan Kecamatan Pakal yakni Kepala Kelurahan, Sekretaris, Bendahara dan 2 Kepala KASI. Sampel penelitian ini menggunakan Rumus Slovin dan memiliki populasi 104 responden sehingga sampel penelitian ini berjumlah 70 responden. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu pengelolaan dana kelurahan dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), 1 variabel dependen kualitas laporan keuangan dan 1 variabel intervening yaitu akuntabilitas. Pengukuran variabel menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) yang terdiri dari *outer model* dan *inner model*.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Model Pengukuran (*Outer Model*) Convergent Validity

Tabel 1. Outer Loading

| | Dana Kelurahan | SIPKD | Kualitas Laporan Keuangan | Akuntabilitas |
|---------|----------------|-------|---------------------------|---------------|
| DK 1 | 0.656 | | | |
| DK 2 | 0.707 | | | |
| DK 3 | 0.804 | | | |
| DK 4 | 0.766 | | | |
| DK 5 | 0.882 | | | |
| SIPKD 1 | | 0.773 | | |
| SIPKD 2 | | 0.822 | | |
| SIPKD 3 | | 0.891 | | |
| SIPKD 4 | | 0.790 | | |

| | |
|---------|-------|
| SIPKD 5 | 0.816 |
| KLP 1 | 0.846 |
| KLP 2 | 0.915 |
| KLP 3 | 0.921 |
| AK 1 | 0.926 |
| AK 2 | 0.784 |
| AK 3 | 0.859 |
| AK 4 | 0.615 |
| AK 5 | 0.888 |

Sumber : Data diolah oleh Smart PLS 4.0
 Berdasarkan diatas dapat dilihat bahwa seluruh indikator terhadap variabel latennya memiliki nilai loading faktor dari 0,7 kecuali DK 1 nilai loading faktor dibawah 0,7

Discriminant Validity

Tabel 2. Cross loading

| | Dana Kelurahan | SIPKD | Kualitas Laporan Keuangan | Akuntabilitas |
|---------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|
| DK 1 | 0.656 | 0.528 | 0.402 | 0.429 |
| DK 2 | 0.707 | 0.579 | 0.285 | 0.324 |
| DK 3 | 0.804 | 0.639 | 0.554 | 0.572 |
| DK 4 | 0.766 | 0.600 | 0.241 | 0.453 |
| DK 5 | 0.882 | 0.737 | 0.532 | 0.624 |
| SIPKD 1 | 0.725 | 0.773 | 0.341 | 0.556 |
| SIPKD 2 | 0.516 | 0.822 | 0.657 | 0.825 |
| SIPKD 3 | 0.824 | 0.891 | 0.471 | 0.639 |
| SIPKD 4 | 0.599 | 0.790 | 0.684 | 0.767 |
| SIPKD 5 | 0.730 | 0.816 | 0.511 | 0.582 |
| KLP 1 | 0.494 | 0.539 | 0.846 | 0.698 |
| KLP 2 | 0.491 | 0.615 | 0.915 | 0.791 |
| KLP 3 | 0.511 | 0.661 | 0.921 | 0.806 |
| AK 1 | 0.643 | 0.824 | 0.725 | 0.926 |
| AK 2 | 0.498 | 0.661 | 0.745 | 0.784 |
| AK 3 | 0.504 | 0.726 | 0.720 | 0.859 |
| AK 4 | 0.389 | 0.471 | 0.593 | 0.615 |
| AK 5 | 0.607 | 0.746 | 0.730 | 0.888 |

Sumber : Data di olah oleh Smart PLS 4.0

Berdasarkan diatas *Discriminant Validity* menunjukkan nilai cross loading juga menunjukkan adanya *discriminate validity* yang baik karena nilai korelasi indikator-indikator terhadap konstraknya lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya.

Tabel 3. Cronbach Alpha dan Composite Reliability.

| | Cronbach Alpha | Composite Reliability |
|---------------------------|----------------|-----------------------|
| Dana Kelurahan | 0.825 | 0.859 |
| SIPKD | 0.879 | 0.893 |
| Kualitas Laporan Keuangan | 0.875 | 0.880 |
| Akuntabilitas | 0.874 | 0.890 |

Sumber : Data di olah oleh Smart PLS 4.0

Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability* seluruh variabel memiliki

nilai lebih dari 0.70 (>0.70), sehingga seluruh variabel dapat dinyatakan lulus uji reliabilitas.

Nilai Uji AVE

Tabel 4. Nilai Uji AVE

| <i>Avarage Variance Extracted (AVE)</i> | |
|---|-------|
| Dana Kelurahan | 0.588 |
| SIPKD | 0.671 |
| Kualitas Laporan Keuangan | 0.800 |
| Akuntabilitas | 0.675 |

Sumber:Data diolah oleh Smart PLS 4.0
 Avarage Variance Extranced (AVE) dinyatakan valid apabila menunjukkan angka >0,5. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada seluruh variabel penelitian ini memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,5. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian ini telah memenuhi standar dan dianggap valid.

Model Struktural (Inner Model)

Tabel 5. Nilai R-Square

| | R-Square |
|---------------------------|----------|
| Kualitas Laporan Keuangan | 0.747 |
| Akuntabilitas | 0.719 |

Sumber : Data diolah oleh SmartPLS 4.0

Tabel diatas menunjukkan nilai *R-square* untuk kualitas laporan keuangan adalah sebesar 0.747 berarti dapat dijelaskan sebesar 74.7% oleh pengelolaan dana desa dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Untuk nilai *R-Square* akuntabilitas sebesar 0.719 berarti akuntabilitas dapat dijelaskan sebesar 71,9% oleh oleh pengelolaan dana desa dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan daerah sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 6. Uji Hipotesis

| | Original sample | Sample mean | Standard deviation | T statistics | P values | Keterangan |
|---|-----------------|-------------|--------------------|--------------|----------|------------------|
| Pengelolaan Dana Kelurahan (X1) → Kualitas Laporan Keuangan (Y) | 0.125 | 0.149 | 0.148 | 0.846 | 0.398 | Tidak Signifikan |
| SIPKD (X2) → Kualitas Laporan Keuangan (Y) | -0.279 | -0.337 | 0.255 | 1.094 | 0.274 | Tidak Signifikan |
| Pengelolaan Dana Kelurahan (X1) → Akuntabilitas (Z) | -0.114 | -0.217 | 0.464 | 0.663 | 0.504 | Tidak Signifikan |
| SIPKD (X2) → Akuntabilitas (Z) | 0.928 | 0.947 | 0.210 | 4.408 | 0.000 | Signifikan |
| Akuntabilitas (Z) → Kualitas Laporan Keuangan (Y) | 1.012 | 1.055 | 0.156 | 6.537 | 0.000 | Signifikan |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|-------|-------|-------|------------------|
| Pengelolaan Dana Kelurahan (X1) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y) -> Akuntabilitas (Z) | -0,102 | -0,138 | 0,243 | 0,419 | 0,675 | Tidak Signifikan |
| SIPKD (X2) -> Kualitas Laporan Keuangan (Y) -> Akuntabilitas (Z) | 0,939 | 1,018 | 0,340 | 2,763 | 0,006 | Signifikan |

Sumber : Olah Data oleh SmartPLS 4.0

Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan(H1)

Hasil dari analisis data hipotesis pertama menunjukkan pengujian pengaruh pengelolaan dana kelurahan terhadap kualitas laporan keuangan menghasilkan nilai *path coefficient* sebesar 0,125 dengan p-value 0,398. Berdasarkan hasil tersebut berarti pengelolaan dana kelurahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena memiliki p-value lebih dari 0,05. Untuk koefisien beta sebesar 0,125 menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbalik arah antara pengelolaan dana kelurahan dengan kualitas laporan keuangan yang jika pengelolaan dana kelurahan meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan turun sebesar 0,125. Berbeda dalam penelitian yang dilakukan (Vidyasari, 2021) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dalam hal ini aparatur kelurahan masih belum mengoptimalkan pengelolaan dana kelurahan dikarenakan belum adanya aturan yang paten dari pemerintah kota untuk pelaporan dana kelurahan tersebut.

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan(H2)

Hasil dari analisis data hipotesis kedua menunjukkan pengujian pada pengaruh SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan yang menghasilkan *Path coefficient* 0,279 dengan p-value 0,274. Berdasarkan hasil tersebut berarti

SIPKD tidak berpengaruh signifikan karena memiliki p-value lebih dari 0,05. Untuk koefisien beta sebesar 0,208 menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbalik arah antara SIPKD dengan kualitas laporan keuangan yang jika SIPKD meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan turun sebesar 0,279. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Defitri, 2022) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa penerapan SIPKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan akan meningkat jika penerapan SIPKD berjalan dengan efektif. Dalam hal ini aparatur belum meningkatkan menggunakan aplikasi SIPKD tersebut untuk pembuatan laporan keuangan, dapat dilihat dari fungsi SIPKD tersebut meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Akuntabilitas(H3)

Hasil menunjukkan bahwa pengujian pengaruh pengelolaan dana kelurahan terhadap akuntabilitas menghasilkan nilai *path coefficient* 0,100 dengan p-value 0,643. Oleh karena itu, pengelolaan dana kelurahan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas. Untuk koefisien beta sebesar 0,100 menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbalik arah antara

pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas yang jika pengelolaan dana desa meningkat satu satuan, maka akuntabilitas akan turun sebesar 0,100. Hal ini berbeda dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana kelurahan akuntabilitas. Berbeda dengan penelitian (Sari, M. S., & Zefri, 2019) menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas, pengetahuan dan pengalaman PNS berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana kelurahan. Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mempunyai upaya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah secara tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam mengelola keuangan daerah dibutuhkan standar akuntansi pemerintah yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diterima secara umum.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas(H4)

Hasil menunjukkan bahwa pengujian pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas menghasilkan nilai *path coefficient* 0,928 dengan p-value 0,000. Hal tersebut menandakan bahwa SIPKD berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas karena memiliki p-value kurang dari 0,05. Hal ini dikarenakan variabel SIPKD dan variabel Akuntabilitas meningkat satu satuan sebesar 0,928 sehingga hipotesis ini teruji dan terbukti bahwa terdapat pengaruh yang nyata. Hal ini sejalan dengan penelitian (Fajri et al., 2019) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan

daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang akurat akan mempengaruhi informasi atau pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Winarni et al., 2020) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (H5)

Hasil dari analisis data hipotesis ke empat dalam penelitian ini menunjukkan pengujian pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan menghasilkan nilai *path coefficient* 1,012 dengan p-value 0,000. Hal tersebut menandakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. karena memiliki p-value kurang dari 0,05. Untuk koefisien beta sebesar 1,012 menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara akuntabilitas dengan kualitas laporan keuangan yang jika akuntabilitas meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan naik sebesar 1,012 sehingga hipotesis ini teruji dan terbukti bahwa terdapat pengaruh yang nyata.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Idawati & Eleonora, 2020) analisis menunjukkan akuntabilitas keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, apabila diinterpretasikan lebih luas yakni laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas pemerintah kepada wakil rakyat di parlemen atau lembaga-lembaga lainnya harus disajikan dengan benar sehingga bisa memiliki kualitas yang baik yaitu yang

relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh para penggunanya.

Pengaruh Pengelolaan Dana Kelurahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Memediasi Akuntabilitas (H6)

Hasil dari analisis data hipotesis keenam dalam penelitian ini menunjukkan pengujian pengaruh pengelolaan dana kelurahan terhadap kualitas laporan keuangan melalui akuntabilitas menghasilkan nilai *path coefficient* 0,102 dengan p-value 0,675. Hal tersebut menandakan bahwa pengelolaan dana kelurahan secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui akuntabilitas karena memiliki p-value lebih dari 0,05. Berbeda dengan peneliti dari (Paramayana et al., 2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Memediasi Akuntabilitas(H7)

Hasil dari analisis data hipotesis ketujuh dalam penelitian ini menunjukkan pengujian pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan melalui akuntabilitas menghasilkan nilai *path coefficient* 0,939 dengan p-value 0,006. Hal tersebut menandakan bahwa SIPKD secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui akuntabilitas karena memiliki p-value kurang dari 0,05. Untuk koefisien beta sebesar 0,939 menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan melalui

akuntabilitas meningkat satu satuan sebesar 0,939 sehingga hipotesis ini teruji dan terbukti bahwa terdapat pengaruh yang nyata. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ariandi, 2021) Terdapat pengaruh positif signifikan Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka semakin meningkat kualitas laporan keuangan. Efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan menjadi suatu hal yang penting. Karena hal ini akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana kelurahan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi Akuntabilitas dapat memiliki hasil yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi akuntabilitas. Implikasi terhadap hasil penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya peran aparatur kelurahan untuk mengelola dana kelurahan untuk pemberdayaan dan pembangunan pada masyarakat yang ada dilungkungan tersebut. Pada dasarnya penelitian ini memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian kedepannya supaya peneliti selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu proses pengisian kuesioner tergolong

lama karena di beberapa kelurahan adanya penundaan pengisian sehingga menghambat peneliti untuk menyelesaikan pengambilan koesioner.

Daftar Pustaka

- Ariandi, F. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Palopo. *Insan Cita Bongaya Researh Journal*, 1(1), 85–95. <http://www.icbrj.org/index.php/icbrj/article/view/11%0Ahttp://www.icbrj.org/index.php/icbrj/article/download/11/31>
- Defitri, S. Y. (2022). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 8(1), 40–49. <https://doi.org/10.53494/jira.v8i1.100>
- Fajri, R. N., Djunali, & Hartono, S. (2019). *1 . Introduction Menurut UNDP (United Nation Development Program)*, akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari good governance , yang menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya . Sedangkan menurut Turner. 2(1), 1–15.
- Idawati, W., & Eleonora, L. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153–172. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 69–78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Paramayana, A. N., Dewi, R. R., & Astungkara, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Owner*, 6(4). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1070>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- raharjo, eko. (n.d.). An accounting perspective. *The Management of Intellectual Property*, 40–65. <https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3).
- Sholahudin. (2022) <https://www.jawapos.com/surabaya-a-raya/01395342/soroti-dana-kelurahan-di-surabaya-baru-terserap-1725-persen>
- Vidyasari, F. N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.

Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.197>